

**Address :** Tuesday Block No. 76 Rt/Rw 01/003  
Jatitengah Village, Jatitujuh District, Majalengka  
Regency, West Java


**Email :** arjijournal@gmail.com


**Contact :** 0821-4250-1527


**Available at:**

<https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI>

Volume 7 Number 4 Year 2025

 DOI : 10.61227

 E-ISSN : 2775-0787

 P-ISSN : 2774-9290



---

## Pendidikan Literasi Politik dan Tantangan *Post-truth* dalam Ruang Publik Indonesia Pasca Pemilihan Umum 2024

2489 – 2509

---

## Political Literacy Education and *Post-truth* Challenges in the Indonesian Public Space After the 2024 General Election

---

**Artikel dikirim :**


2025-08-07

**Artikel diterima :**


2025-08-22

**Artikel diterbitkan :**

2025-10-01

 Nur Arifuddin<sup>1\*</sup>, Nanang Hermawan<sup>2</sup>

 <sup>1</sup> STAI PTDII Jakarta, <sup>2</sup> STAI Haji Agus Salim Cikarang

 Email Correspondence : [nur.arifuddin@ptdii.ac.id](mailto:nur.arifuddin@ptdii.ac.id)

**Kata Kunci:**

Demokrasi *post-truth*, literasi politik kritis, ruang publik digital, politik identitas, pascapemilu 2024

**Abstrak:** Pemilu 2024 membuka babak baru dalam lanskap politik Indonesia yang ditandai dengan menguatnya fenomena *parcok* (partai coklat) dan merebaknya disinformasi di era *post-truth*, yang turut membentuk persepsi publik terhadap demokrasi. Dalam situasi ini, pendidikan literasi politik menjadi kebutuhan mendesak guna membekali warga dengan kemampuan berpikir kritis dan etis dalam menghadapi polarisasi wacana. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi tantangan dan peluang penguatan demokrasi melalui literasi politik dalam konteks Indonesia pasca pemilihan umum 2024. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder, penelitian ini berlangsung antara Januari hingga April 2025. Objek kajian meliputi wacana politik digital, narasi keagamaan dalam kontestasi elektoral, serta dinamika opini publik di media sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur dan analisis wacana kritis, dengan pendekatan historis dan kontekstual. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi, kategorisasi tematik, serta interpretasi kritis untuk menemukan pola, makna, dan relasi antarwacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan literasi politik yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan etis memiliki potensi besar dalam membendung praktik diskriminasi

---

kelompok serta memperkuat budaya demokrasi deliberatif. Penelitian ini berkontribusi pada kerangka literasi politik kritis sebagai kontribusi teoretis dan strategis untuk membentuk ruang publik yang inklusif, etis, dan berkeadaban dalam demokrasi Indonesia kontemporer.

**Keywords:**

*Post-truth* democracy, critical political literacy, digital public space, identity politics, post-election 2024

**Abstract:** The 2024 election opens a new chapter in Indonesia's political landscape marked by the strengthening of the parcok (brown party) phenomenon and the spread of disinformation in the *post-truth* era, which has helped shape public perception of democracy. In this situation, political literacy education is an urgent need to equip citizens with the ability to think critically and ethically in the face of polarization of discourse. This research aims to explore the challenges and opportunities for strengthening democracy through political literacy in the context of Indonesia after the 2024 general election. Using a descriptive qualitative method based on a literature study of primary and secondary sources, this study took place between January and April 2025. The objects of study include digital political discourse, religious narratives in electoral contests, and the dynamics of public opinion on social media. The data collection technique was carried out through literature documentation and critical discourse analysis, with historical and contextual approaches. The collected data is analyzed through a process of reduction, thematic categorization, and critical interpretation to find patterns, meanings, and relationships between discourses. The results of the study show that political literacy education that touches cognitive, affective, and ethical aspects has great potential in stemming the practice of group discrimination and strengthening the culture of deliberative democracy. This research contributes to the critical political literacy framework as a theoretical and strategic contribution to shaping an inclusive, ethical, and civilized public space in contemporary Indonesian democracy.

Copyright © 2025, Authors

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-nonCommercial-shareAlike 4.0 International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Available at : [arji.insaniapublishing.com/index.php/arji](http://arji.insaniapublishing.com/index.php/arji)



DOI :



E-ISSN : 2775-0787



P-ISSN : 2774-9290



## PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024 berada pada fase yang menentukan: apakah ia akan mengarah pada konsolidasi demokrasi substantif atau justru terjebak dalam siklus kemunduran yang penuh paradoks. Pemilu 2024, yang semestinya menjadi perayaan rasionalitas politik dan partisipasi publik yang bermakna, justru menjadi cermin rapuhnya fondasi demokrasi kita (Nurfebriansyah et al., 2025). Alih-alih memperlihatkan perdebatan substansial berbasis data dan argumentasi, kontestasi politik justru dipenuhi oleh praktik disinformasi sistematis, personalisasi kekuasaan, serta pelemahan ruang deliberatif publik (Belinda et al., 2024). Fenomena *post-truth* memperburuk situasi ini: fakta objektif kian tersingkir dari wacana publik, tergantikan oleh opini yang dikendalikan emosi dan afiliasi kelompok. Di dalam ruang digital yang tunduk pada logika algoritma, kecepatan penyebaran informasi palsu melampaui upaya klarifikasi; konten dangkal dan sensasional memperoleh atensi jauh lebih besar daripada argumentasi rasional yang memerlukan refleksi kritis (Kurniawan, 2025). Krisis epistemik yang dihasilkan bukan sekadar persoalan informasi keliru, tetapi ancaman struktural terhadap kemampuan warga negara untuk berpikir secara kritis dan membuat keputusan politik yang berlandaskan kebenaran.

Krisis ini tidak hanya mereduksi kualitas rasionalitas publik, tetapi juga berimplikasi langsung pada kohesi sosial yang selama ini menjadi penopang keberlanjutan demokrasi. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, fenomena disinformasi kerap mengambil bentuk politisasi identitas berbasis agama, etnis, dan ideologi (A. Setiawan et al., 2025). Laporan (MAFINDO, 2024) mencatat bahwa selama masa kampanye pemilu 2024 beredar lebih dari 1.300 konten hoaks politik yang secara sistematis memanfaatkan simbol keagamaan dan narasi kelompok untuk memobilisasi emosi massa. Akibatnya, perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan politik berubah menjadi jurang sosial yang sulit dijembatani. Polarisasi ini tidak hanya memecah belah warga di tingkat ideologis, tetapi juga merembes ke ranah kehidupan sehari-hari, mengubah keluarga, komunitas, dan ruang publik menjadi arena pertarungan narasi. Ketika kemampuan literasi digital dan politik warga lemah, kekuatan yang mengendalikan aliran informasi secara efektif dapat mengarahkan opini publik sesuai kepentingan mereka, menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “oligarki informasi” yang beroperasi di balik tirai algoritma (Xu et al., 2020).

Menghadapi situasi yang semakin kompleks ini, pendidikan literasi politik muncul sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat daya tahan demokrasi. Namun, literasi politik yang dibutuhkan jelas berbeda dari pendekatan prosedural dan normatif yang selama ini dominan. Literasi politik yang relevan untuk era *post-truth* harus bersifat transformatif, mampu menanamkan kesadaran kritis yang mendalam, membentuk etika kewargaan yang kokoh, dan mengembangkan keterampilan analisis terhadap praktik kekuasaan (Lazzavietamsi, 2024). Literasi semacam ini tidak hanya mengajarkan bagaimana memilih dalam pemilu, tetapi juga bagaimana memahami narasi politik, mengidentifikasi manipulasi simbolik, menilai kredibilitas informasi, dan merespons perbedaan pandangan dengan argumen yang terinformasi. Dengan demikian, pendidikan

literasi politik menjadi alat emansipasi warga, membekali mereka bukan hanya untuk menjadi pemilih rasional, tetapi juga aktor politik reflektif yang dapat mempertahankan kualitas ruang publik demokratis di tengah kepungan informasi yang menyesatkan.

Penelitian Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa kualitas demokrasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas literasi politik warganya. Di tengah arus informasi yang melimpah, tantangan utama bukan lagi akses terhadap informasi, tetapi kemampuan untuk memilah, menganalisis, dan mengartikulasikan kebenaran secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan literasi politik harus diposisikan sebagai praksis demokrasi, proses sadar dan sistematis yang membentuk warga negara sebagai subjek politik yang otonom, etis, dan reflektif (Immordino-Yang et al., 2024). Fokus utama penelitian ini adalah merumuskan kerangka konseptual pendidikan literasi politik yang adaptif terhadap lanskap digital dan mampu menjadi benteng epistemik, kultural, serta etis untuk menjaga keberlanjutan ruang publik demokratis. Dengan membangun kapasitas warga dalam membaca dunia secara kritis dan memahami dinamika kekuasaan, pendidikan ini diharapkan dapat menjadi strategi resistensi yang efektif terhadap penetrasi disinformasi dan manipulasi politik.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian terkait pendidikan politik dan literasi digital di Indonesia telah berkembang, namun sebagian besar masih berfokus pada dimensi tertentu saja. (Wijaya & Amalia, 2024) meneliti efektivitas pendidikan politik di kalangan pemuda urban, menemukan bahwa intervensi pendidikan mampu meningkatkan pengetahuan prosedural demokrasi, namun belum banyak menyentuh aspek kesadaran kritis dan keberanian etis. (Wahyuningroem et al., 2024) mengaitkan partisipasi digital dengan peningkatan aktivisme politik, namun tidak mengembangkan model pendidikan literasi politik yang terstruktur untuk memanfaatkan potensi partisipasi tersebut. Sementara itu, (Imsa et al., 2025) mengidentifikasi media sosial sebagai sumber utama pembentukan opini politik generasi muda, tetapi menyoroti lemahnya literasi digital yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap disinformasi, tanpa menawarkan kerangka pedagogis yang konkret untuk mengatasinya.

Temuan serupa juga terlihat pada penelitian (Saud et al., 2023) yang mengevaluasi kurikulum kewarganegaraan di sekolah, menemukan dominasi pendekatan normatif dan hafalan konsep, sementara diskusi kritis dan analisis politik aktual nyaris absen. (Teegelbeckers et al., 2023) mengeksplorasi penggunaan metode partisipatif seperti permainan peran, narasi lokal, dan dialog antarwarga sebagai strategi pendidikan politik, namun aplikasinya masih terbatas pada skala lokal dan belum terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. (G. I. Sari et al., 2024) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, antara lembaga pendidikan, media, komunitas sipil, dan platform digital, namun tidak menawarkan model konseptual yang memadukan kolaborasi tersebut dalam kerangka literasi politik yang komprehensif. Dari keseluruhan studi ini terlihat bahwa pendekatan yang ada masih bersifat parsial dan kurang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan praksis kewargaan dalam satu model yang utuh.

Berbeda dari penelitian terdahulu, artikel ini menawarkan kerangka konseptual pendidikan literasi politik yang menggabungkan teori demokrasi deliberatif, kajian media digital, dan pedagogi kritis dalam satu bangunan integratif. Distingsi utama terletak pada penekanan simultan terhadap tiga dimensi literasi: (1) kapasitas kognitif untuk memahami sistem politik dan menilai informasi, (2) kapasitas afektif untuk membangun etika kewargaan yang inklusif, dan (3) kapasitas praksis untuk berpartisipasi aktif dalam ruang publik. Secara teoritik, penelitian ini memperluas pemahaman tentang literasi politik sebagai instrumen resistensi epistemik terhadap disinformasi dan polarisasi. Secara praktis, kerangka ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi pendidikan yang dapat diimplementasikan di berbagai level, mulai dari sekolah, komunitas, hingga ruang digital, sehingga warga negara tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen wacana yang berkualitas dan kontributor aktif bagi demokrasi yang sehat.

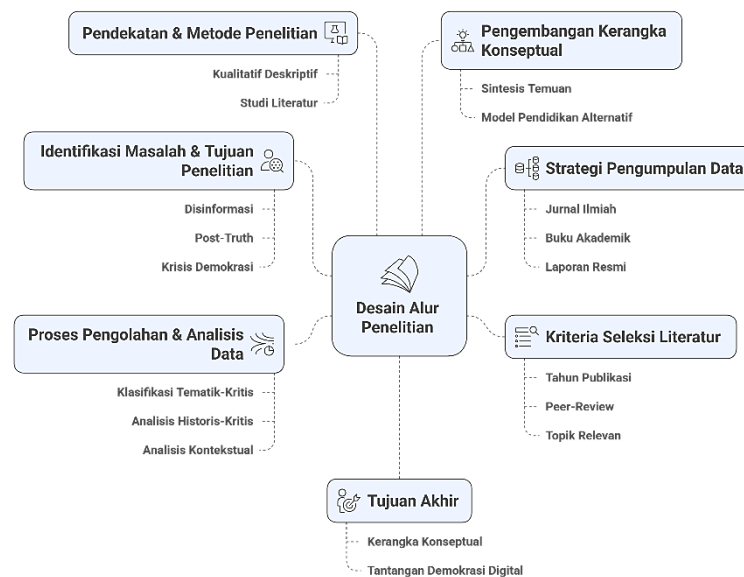
## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai kerangka utama untuk menelusuri konstruksi konseptual, dinamika wacana, dan praktik literasi politik dalam membentuk kesadaran demokratis yang kritis serta inklusif di tengah tantangan disinformasi dan *post-truth* pasca pemilu 2024. Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansinya dalam menggali dimensi filosofis, pedagogis, dan sosiologis pendidikan politik di era digital, sekaligus memungkinkan analisis yang reflektif dan kontekstual terhadap hubungan antara literasi politik, demokrasi substantif, dan komunikasi politik digital (Sutisna, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber akademik yang memenuhi standar validitas dan substansi. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan kriteria inklusi: publikasi antara tahun 2018–2025, telah melalui proses *peer-review* atau editorial ilmiah, dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu literasi politik, pendidikan demokrasi, ruang publik digital, *post-truth*, atau pedagogi kritis. Sumber data meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik dan monograf, dokumen kebijakan strategis dari lembaga pemerintah maupun organisasi internasional seperti UNESCO dan UNDP, serta laporan riset perguruan tinggi. Hasil seleksi menghasilkan 34 artikel jurnal, 10 buku primer, dan 5 dokumen kebijakan yang menjadi basis kajian.

Kriteria Analisis data dilakukan dengan teknik tematik-kritis, yakni mengelompokkan literatur ke dalam tema utama: (1) konstruksi literasi politik kritis dalam pendidikan, (2) fenomena *post-truth* dan implikasinya bagi ruang publik demokratis, (3) peran media sosial dan algoritma dalam membentuk wacana politik, (4) strategi pedagogis menghadapi disinformasi dan polarisasi, dan (5) model pendidikan politik berbasis demokrasi substantif dan etika publik (Laventia et al., 2025). Pendekatan ini membuka ruang untuk sintesis konseptual baru yang menggabungkan teori, hasil penelitian terdahulu, dan refleksi kritis terhadap praktik lapangan.

Untuk memperkuat analisis, digunakan pendekatan historis-kritis dan pendekatan kontekstual. Pendekatan historis menelusuri perkembangan konsep literasi politik dari model normatif-formal menuju paradigma kritis-transformatif, termasuk pengaruh pemikiran Freire dan Habermas. Pendekatan kontekstual digunakan untuk membaca kondisi ruang publik Indonesia pasca pemilu 2024, termasuk dinamika media sosial, politisasi identitas, dan respons kebijakan pendidikan terhadap krisis demokrasi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif-preskriptif: merumuskan kerangka pendidikan literasi politik yang lebih relevan dengan tantangan zaman.



**Gambar 1. Desain Alur Penelitian**

Melalui desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan kerangka konseptual alternatif bagi pendidikan politik yang kritis, solutif, dan adaptif terhadap realitas demokrasi digital di Indonesia. Model yang dihasilkan bertujuan menjawab tantangan seperti delegitimasi institusi, depolitisasi warga, dan krisis kepercayaan publik, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk merawat demokrasi yang deliberatif, inklusif, dan berakar pada kesadaran etis terhadap pentingnya kebenaran dalam ruang publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Polarisasi Pasca Pemilu 2024: Realitas Demokrasi dalam Era Parcok

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi elektoral bangsa. Di satu sisi, ia memperlihatkan keberlangsungan mekanisme demokrasi prosedural dalam bingkai konstitusi yang tetap kokoh, meskipun dihadapkan pada tekanan politik dan disinformasi yang masif (Baker, 2023). Di sisi lain, pemilu ini juga membuka kembali luka lama dan memperdalam krisis demokrasi substansial, yang kini

tidak lagi berakar pada deliberasi rasional, melainkan terjebak dalam polarisasi emosional dan tribalisme digital (Setiyono & Sardini, 2025).

Salah satu manifestasi dari kondisi ini adalah munculnya fenomena *parcok* (partai coklat), sebuah istilah yang berkembang di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap gaya politik yang otoriter, maskulinistik, dan simbolik yang mengaburkan substansi kebijakan dan mempersempit ruang dialog demokratis (Regilme & Parthenay, 2024). Fenomena ini mencerminkan kondisi di mana warga negara tampak aktif secara politik, bahkan sangat vokal dan militan, namun sering kali kehilangan daya kritis karena hanya mengonsumsi serta menyebarkan informasi yang memperkuat afiliasi identitas dan loyalitas kelompoknya (Mustofa et al., 2024).

Data observasi digital selama masa kampanye hingga pascapemilu memperlihatkan dominasi ruang publik oleh retorika hiperloyalitas dan kampanye delegitimasi terhadap pihak oposisi (Khamdan & Abidin, 2025). Dalam berbagai platform media sosial seperti Twitter (kini X), TikTok, Facebook, Instagram, dan terutama dalam ekosistem tertutup seperti WhatsApp Group dan Telegram, ditemukan pola komunikasi yang intens namun dangkal: warga saling membombardir dengan meme politik, potongan video yang dipotong konteksnya, serta narasi konspiratif yang cenderung antiintelektual (Prihantoro et al., 2024). Di sinilah kita menyaksikan realitas *post-truth* bukan hanya sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai praktik sehari-hari dalam demokrasi digital Indonesia.

Dalam atmosfer seperti ini, pemilu bukan lagi ruang kontestasi ide dan program, melainkan arena pertempuran identitas yang membelah warga menjadi kubu "kami" versus "mereka". Hal ini mengafirmasi peringatan dari para pemikir demokrasi kontemporer seperti (Sunstein, 2018) tentang bahaya *group polarization* dalam ruang gema digital (*echo chambers*) dan dari (Benkler et al., 2018) yang menekankan peran arsitektur informasi dalam memperkuat tribalitas dan fragmentasi epistemik. Konteks Indonesia, sebagaimana dianalisis (Lim, 2020), menunjukkan bahwa demokrasi digital kita tidak hanya belum matang, tetapi juga sangat rentan dikendalikan oleh pasukan siber terorganisir (*cyber troops*) yang secara sistematis menyebarkan disinformasi dan mengelola persepsi publik demi kepentingan elite tertentu.

Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilu 2024 bukan semata kemenangan elektoral, tetapi juga kemenangan narasi populis yang berhasil memanipulasi sentimen kolektif (Ho et al., 2024). Di balik euforia "rekonsiliasi nasional" yang dijanjikan, terdapat ironi demokrasi yang menyakitkan: keragaman politik direduksi menjadi keseragaman wacana, dan kritik dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan. Polarisasi politik tak hanya meretakkan hubungan antar warga, tetapi juga menggeser fungsi ruang publik dari tempat pertukaran gagasan menjadi ladang perang informasi yang penuh hasutan dan kebencian (Goel et al., 2023).

Lebih jauh, struktur algoritmik dari media sosial memperparah kondisi ini. Algoritma tidak dirancang untuk mendorong perdebatan sehat atau klarifikasi informasi, melainkan untuk memaksimalkan *engagement*. Yang artinya, konten yang emosional, kontroversial, dan memecah belah cenderung lebih disebarluaskan (Milli et al., 2025).

Dengan demikian, demokrasi tidak hanya disandera oleh elite politik, tetapi juga oleh desain teknologi yang tidak netral. Demokrasi digital tanpa literasi kritis adalah jalan tol menuju otoritarianisme emosional, di mana rasionalitas digantikan oleh sensasi, dan opini diperlakukan lebih sakral daripada kebenaran itu sendiri (Kekki, 2024).

Dalam kondisi ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah demokrasi kita benar-benar hidup atau hanya menjadi simulakra belaka, sebuah penampakan prosedural tanpa kedalaman substansi? Apakah warga negara masih memiliki kapasitas untuk menjadi *homo politicus* yang otonom dan reflektif, atau telah tereduksi menjadi *homo algoritmikus* yang hanya mengulang apa yang ditawarkan oleh lini masa mereka?

Pendidikan literasi politik menjadi semakin mendesak bukan hanya sebagai program edukatif, tetapi sebagai *intervensi kultural* dan *upaya penyelamatan epistemik*. Literasi politik bukan sekadar kemampuan membaca atau mengenali simbol-simbol politik, tetapi melibatkan pembentukan daya pikir kritis, etika komunikasi, serta kesadaran kolektif atas pentingnya ruang publik yang sehat dan dialogis (Lewandowsky et al., 2023). Dalam konteks pascapemilu 2024, pendidikan literasi politik harus dipahami sebagai infrastruktur demokrasi yang mendasar, bukan pelengkap kurikulum, melainkan penyangga eksistensial bagi keberlangsungan republik (Nurfebriansyah et al., 2025).

Maka, tantangan terbesar demokrasi Indonesia pascapemilu bukanlah pada persoalan teknis penyelenggaraan atau hasil pemilu itu sendiri, tetapi pada kondisi ekosistem kognitif dan afektif warga yang telah termakan oleh logika *post-truth* (Kurniawan, 2025). Kita tidak sedang berhadapan dengan publik yang bodoh, tetapi publik yang lelah, terpolarisasi, dan kehilangan orientasi dalam kabut informasi yang kabur antara fakta dan fiksi. Dalam situasi ini, literasi politik bukan hanya alat pembebasan, tetapi bentuk perlawanan terhadap banalitas kebohongan dan banalitas kekuasaan (Metag & Gurr, 2023).

### **Literasi Politik sebagai Proyek Emansipatoris dalam Pendidikan Pasca Pemilu**

Pendidikan literasi politik tidak dapat lagi dipahami secara sempit sebagai proses informatif yang hanya mengenalkan prosedur elektoral, struktur lembaga negara, atau fungsi formal lembaga perwakilan (Bowyer & Kahne, 2020). Dalam lanskap pascapemilu 2024 yang ditandai oleh menguatnya fenomena *post-truth*, politik identitas digital, dan dominasi narasi parcok (politik akrobatik, transaksional, dan populistik), literasi politik harus direkonstruksi sebagai proyek emansipatoris, yakni suatu upaya pedagogis untuk membentuk subjek warga yang sadar, kritis, reflektif, dan resistif terhadap kooptasi informasi dan manipulasi wacana (Adam, 2025).

Dalam tradisi pemikiran (Freire, 2020), khususnya dalam *Pedagogy of the Oppressed*, literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga dengan *reading the world*, membaca realitas sosial secara kritis sebagai bagian dari proses pembebasan. Literasi politik dalam arti ini bukanlah instrumen indoktrinasi, tetapi alat dialektika: warga negara diposisikan bukan sebagai objek penyuluhan politik, melainkan sebagai subjek historis yang mampu menginterogasi relasi kuasa, menafsirkan

ulang makna partisipasi, serta menyusun ulang struktur pemaknaan politik mereka sendiri (A Hamudy & Rifki, 2025). Dengan demikian, pendidikan politik menjadi medan perlawanan epistemik terhadap hegemoni narasi elite dan dominasi algoritma digital.

Konteks Indonesia pascapemilu 2024 memperlihatkan bahwa medan politik telah mengalami perubahan yang signifikan: ekspresi politik warga berlangsung dalam tempo yang cepat, impulsif, dan seringkali dibentuk oleh dinamika viralitas di media sosial (Kulau, 2024). Dalam kondisi ini, mayoritas bentuk partisipasi politik bersifat instan, reaktif, dan tidak berbasis proses refleksi yang matang. Ketika logika politik terjebak dalam perang meme, narasi parocok, dan agenda populisme digital, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar hasil pemilu, melainkan daya nalar publik itu sendiri (Rezeki et al., 2024). Oleh sebab itu, pendidikan literasi politik harus mampu mengatasi kondisi ini dengan menciptakan ruang-ruang artikulasi baru yang memungkinkan warga melakukan proses *conscientization*, yakni kesadaran kritis terhadap posisi sosial-politiknya dalam struktur kekuasaan yang lebih luas (Supriyadi et al., 2024).

Analisis terhadap program-program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh lembaga formal negara seperti KPU, Bawaslu, dan Kemendikbudristek menunjukkan masih adanya kecenderungan teknokratis dan proseduralistik (Ivancsyah, 2025). Program-program ini lebih sering bersifat satu arah, berorientasi pada transfer informasi, dan gagal menjangkau kompleksitas medan digital. Sementara itu, inisiatif yang muncul dari masyarakat sipil menawarkan pendekatan yang lebih inovatif dan kontekstual (B. K. Putra et al., 2023). Organisasi seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), Remotivi, dan Jaringan Gusdurian mempraktikkan pendidikan literasi politik yang lebih berbasis komunitas, menggunakan pendekatan naratif dan kultural, serta mendistribusikannya melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram.

Model yang ditawarkan oleh aktor-aktor ini tidak hanya menekankan pada konten edukatif, tetapi juga pada bentuk dan konteks distribusi. Literasi politik tidak lagi dibatasi pada ruang kelas atau lokakarya tatap muka, melainkan dihidupkan dalam bentuk video pendek, podcast, meme edukatif, hingga forum diskusi daring yang bersifat interaktif (F. D. Putra et al., 2022). Pendekatan ini mengindikasikan bahwa literasi politik di era *post-truth* harus menyeberangi batas-batas genre komunikasi tradisional dan melebur ke dalam logika partisipasi digital yang lebih cair. Namun demikian, keunggulan strategi ini tetap menghadapi kendala sistemik, seperti keterbatasan akses teknologi, polarisasi afektif dalam kelompok daring, dan komodifikasi algoritma yang sering menyingkirkan konten edukatif dari jangkauan luas karena dianggap tidak cukup "engaging" (Lybeck et al., 2024).

Lebih jauh, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menjadikan pendidikan literasi politik sebagai gerakan kultural yang hidup dan mengakar, bukan sekadar proyek donor, program kurikuler temporer, atau agenda pelatihan formal (Rahman et al., 2023). Literasi politik harus dimaknai sebagai *kebudayaan kewargaan* yang menyeberangi batas usia, kelas sosial, dan identitas politik. Untuk itu, strategi pedagogi politik perlu dirancang dengan prinsip dialogis, partisipatif, dan transformatif (Purwadi et al., 2024). Pendidikan politik tidak cukup hanya mengajarkan bagaimana

memilih, tetapi juga bagaimana meragukan, mengkritisi, dan merefleksikan pilihan-pilihan politik secara etis dan historis (Stitzlein, 2023).

Dalam hal ini, pendekatan pendidikan politik berbasis refleksi kolektif perlu dikembangkan melalui metodologi yang memungkinkan munculnya narasi alternatif dari bawah (Randiawan et al., 2023). Forum warga, diskusi literasi digital di komunitas lokal, hingga pertunjukan seni berbasis isu politik merupakan bentuk-bentuk pedagogi publik yang dapat memperluas makna pendidikan politik di luar ruang kelas (Floranti et al., 2023). Model ini menghidupkan gagasan bahwa literasi politik bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan ruang produksi makna yang kolektif dan politis.

Secara teoretis, kajian ini juga merekomendasikan integrasi pendekatan Freirean dengan teori-teori kontemporer tentang *digital citizenship*, *networked publics* (Boyd, 2014), dan *critical algorithm studies* (Gillespie, 2018), untuk mengembangkan kerangka literasi politik yang mampu membaca lanskap politik digital Indonesia secara lebih holistik. Literasi politik dalam era parcok dan *post-truth* membutuhkan metodologi ganda: di satu sisi, pendekatan emansipatoris yang membebaskan warga dari determinasi narasi elite; di sisi lain, pendekatan kritis yang mengurai cara kerja algoritma dalam membentuk opini dan orientasi politik publik (A. Setiawan et al., 2025).

Dengan demikian, pendidikan literasi politik pascapemilu tidak dapat lagi beroperasi dalam kerangka lama. Ia harus menjadi medan emansipasi baru, tempat warga dilibatkan secara aktif dalam produksi dan kritik makna politik, serta didorong untuk menyusun ulang relasinya dengan pengetahuan, kekuasaan, dan teknologi (Mawarti & Restuningsih, 2024). Dalam skema inilah pendidikan politik menemukan urgensinya bukan sebagai instrumen penyuluhan negara, melainkan sebagai fondasi kultural dari demokrasi yang tahan terhadap badai disinformasi, manipulasi algoritma, dan kooptasi populisme digital (Lilja et al., 2024).

### **Disrupsi Digital dan Tantangan *Post-truth*: Mendidik Kewargaan dalam Lanskap yang Terfragmentasi**

Era digital telah menandai transformasi radikal dalam infrastruktur informasi publik, dan dengan itu pula dalam proses demokratisasi pengetahuan. Salah satu temuan konseptual yang paling mencolok dalam studi ini adalah bagaimana algoritma media sosial tidak sekadar menjadi kanal distribusi informasi, tetapi turut membentuk dan bahkan membatasi horizon epistemik individu (Kaluža, 2022). Dalam konteks ini, algoritma tidak netral; ia secara aktif mengkurasi dunia pengetahuan yang diakses warga, menciptakan *filter bubbles* dan *echo chambers* yang memperkuat prasangka, memvalidasi bias kognitif, serta menyusutkan kemungkinan dialog antarwacana (Figà Talamanca & Arfini, 2022). Sebagaimana dijelaskan oleh (Pariser, 2011) dan dikembangkan lebih lanjut oleh (Sunstein, 2018), warga digital hidup dalam lanskap informasi yang semakin terfragmentasi dan terpolarisasi, di mana fakta dan opini tak lagi dibedakan secara tajam.

Dalam lanskap seperti ini, tantangan terbesar bukan hanya pada penyebaran hoaks atau disinformasi, tetapi pada merosotnya *epistemic trust*, yaitu kepercayaan

terhadap otoritas pengetahuan, institusi media, dan bahkan sains (Tanzer et al., 2024). Fenomena *post-truth* sebagaimana dikonseptualkan oleh (McIntyre, 2018) bukan sekadar soal kebohongan atau propaganda, melainkan tentang kondisi ketika emosi, identitas politik, dan loyalitas afektif menggantikan peran fakta sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Ini adalah krisis epistemologis sekaligus demokratis.

Pendidikan literasi politik dalam konteks ini tidak bisa lagi bertumpu pada model instruksional-konvensional yang menekankan hafalan, pasifisme, atau sekadar pengetahuan prosedural tentang lembaga-lembaga negara. Kita membutuhkan transformasi radikal dalam paradigma pendidikan kewargaan: dari yang bersifat normatif-instruktif menjadi reflektif, partisipatoris, dan kritis (Salsabila et al., 2024). Pendekatan seperti *digital civic education* dan *critical media literacy* harus ditempatkan sebagai inti dari kurikulum kewargaan kontemporer. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Jenkins & Jie, 2024) tentang *participatory culture*, yang menekankan bahwa warga tidak hanya harus menjadi konsumen informasi, melainkan juga produsen makna yang aktif dan bertanggung jawab dalam ruang digital.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena bersilang dengan faktor-faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan dasar, lemahnya budaya literasi kritis, dan absennya regulasi etik terhadap arsitektur algoritmik media sosial (Isabella et al., 2024). Tidak heran jika kampanye politik digital pascapemilu 2024 menunjukkan polarisasi yang akut, mobilisasi afektif yang dangkal, dan meluasnya praktik *parcok* (partisan cokolit) yang menysar preferensi emosional ketimbang rasionalitas politik warga (Khamdan & Abidin, 2025).

Literatur-literatur global yang menjadi dasar kajian ini, seperti laporan (UNESCO, 2025) tentang *Media and Information Literacy*, buku *Digital Democracy, Analogue Politics* karya (Nyabola, 2018), serta studi dari (Wardle & Derakhshan, 2017), secara tegas menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam pendidikan kewargaan digital: (1) *epistemic agency* atau kemampuan individu untuk menilai dan membentuk keyakinan berbasis rasionalitas dan evidensi; (2) kesadaran algoritmik (*algorithmic awareness*) yang memungkinkan warga memahami bagaimana data mereka digunakan untuk membentuk persepsi politik; dan (3) etika digital sebagai kerangka normatif untuk membangun ruang publik yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Dengan menanamkan kesadaran tentang konstruksi sosial dari informasi, dinamika kekuasaan dalam produksi pengetahuan digital, serta bahaya normalisasi kebohongan, pendidikan literasi politik bukan hanya menjadi instrumen demokratisasi, melainkan juga alat perlawanan terhadap otoritarianisme digital (Sonni et al., 2025). Pendidikan, dalam kerangka ini, tidak lagi dimaknai sebagai transmisi pengetahuan, tetapi sebagai praksis transformatif yang memungkinkan warga menjadi subjek aktif dalam merebut kembali kedaulatan epistemik mereka di tengah gempuran algoritma dan komodifikasi afeksi politik (Berry, 2025).

Dalam kerangka inilah kita memahami urgensi membangun model pendidikan literasi politik yang tidak hanya mengajarkan *apa* yang harus diketahui warga, tetapi *bagaimana* mereka harus mengetahui dan *mengapa* itu penting (Sutisna, 2017).

Demokrasi tidak akan bertahan tanpa warga yang mampu membedakan antara kebenaran dan manipulasi; dan pendidikan adalah benteng terakhir dalam perjuangan ini (Kekki, 2024). Dengan demikian, mendidik kewargaan di era *post-truth* berarti membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara informasi, tetapi juga tangguh secara etis dan reflektif secara politik, sebuah agenda besar yang harus dijalankan oleh seluruh ekosistem pendidikan, bukan hanya sebagai proyek kurikulum, tetapi sebagai gerakan budaya demokratis yang holistik dan berkelanjutan (A. Setiawan et al., 2025).

### **Jalan ke Depan: Literasi Politik sebagai Praktik Kritis dan Transformasi Sosial**

Merespons dinamika demokrasi pascapemilu 2024 yang ditandai oleh fenomena parcok, menjamurnya hoaks, serta berkembangnya budaya politik hiperrealitas dalam ruang digital, pendidikan literasi politik tidak dapat lagi dibatasi pada penyampaian informasi normatif semata (Nurmansyah, 2024). Ia harus ditransformasikan menjadi praksis kritis, sebuah medan di mana pengetahuan, kesadaran, dan tindakan bertemu dalam kerangka pembebasan. Literasi politik, dalam konteks ini, bukanlah sekadar kemampuan mengenali aktor politik, memahami sistem pemerintahan, atau membedakan fakta dan opini. Ia adalah proses emansipatoris yang memungkinkan warga, terutama generasi muda, untuk menegosiasikan identitas politiknya, menginterogasi struktur kekuasaan, dan membangun imajinasi kolektif tentang demokrasi yang berkeadilan (Mawarti & Restuningsih, 2024).

Sebagaimana dikemukakan oleh (Freire, 2020) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, pendidikan harus menjadi ruang dialogis di mana realitas politik tidak dikemas secara dogmatis, melainkan dibuka melalui proses refleksi dan aksi yang saling memperkaya. Literasi politik yang transformatif, dalam semangat ini, mengedepankan *conscientização*, kesadaran kritis yang membuat individu tidak hanya memahami ketimpangan, tetapi juga terdorong untuk melawannya secara kolektif dan berkelanjutan (Ju'subaidi et al., 2025). Oleh karena itu, pendidikan literasi politik di era *post-truth* dan parcok menuntut keberanian untuk merombak metode, memperluas ruang, dan merevisi tujuan pendidikan itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia pasca pemilu 2024, transformasi ini dapat diwujudkan melalui praktik-praktik pendidikan politik alternatif yang bersifat bottom-up, kolaboratif, dan berbasis komunitas (Haryani et al., 2024). Misalnya, inisiatif *Sekolah Pemilu Digital* yang menasar pemilih pemula dan masyarakat urban digital native menjadi salah satu bentuk artikulasi dari literasi politik kontekstual. Dengan mengintegrasikan metode microlearning, simulasi debat, dan produksi konten reflektif, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan politik, tetapi juga membentuk kapasitas deliberatif warga. Demikian pula, ruang-ruang diskusi intergenerasi yang difasilitasi oleh kanal YouTube seperti *Politik Kopi Sore* atau *Cerdas Demokrasi* telah menjadi medium baru bagi masyarakat untuk mendialogkan realitas politik tanpa sekat ideologis (Gherman et al., 2022).

Namun, inisiatif semacam itu hanya akan memiliki daya transformatif jika memenuhi tiga prasyarat strategis. Pertama, partisipasi bermakna (*meaningful participation*), yaitu keterlibatan aktif warga dalam mendefinisikan masalah politik dan merancang agenda perubahan (Soeprapto, 2024). Ini menuntut pendekatan partisipatoris yang tidak sekadar melibatkan warga sebagai konsumen informasi, tetapi sebagai produsen wacana dan agen perubahan. Model pendidikan politik semacam ini akan mendorong masyarakat untuk beranjak dari posisi apatis menjadi partisipan reflektif yang menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam merawat demokrasi (Soeprapto, 2024).

Kedua, kritik struktural terhadap sistem politik dan sosial yang melingkupinya. Artinya, pendidikan literasi politik tidak boleh tercerabut dari realitas ketimpangan sosial, korupsi struktural, dan eksklusi politik yang masih membelenggu sebagian besar masyarakat (P. R. Sari & Harianto, 2025). Literasi politik harus mampu menyingkap lapisan-lapisan dominasi yang kerap tersembunyi di balik jargon-jargon demokrasi prosedural. Dengan kata lain, pendidikan harus menjadikan politik sebagai objek refleksi kritis dan tindakan etis, bukan sebagai panggung kosmetik yang memperindah status quo (Nally, 2024).

Ketiga, inovasi pedagogis, yakni pembaruan dalam metode dan media pembelajaran politik. Di tengah disrupsi digital dan perubahan pola interaksi sosial, pendidikan politik harus mampu memadukan teknologi digital, narasi lokal, dan nilai-nilai demokrasi substantif dalam pendekatannya (Khriswina et al., 2025). Modul literasi politik harus tidak hanya informatif tetapi juga interaktif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan keragaman budaya, pengalaman sejarah, dan tantangan sosial setempat (Anjarsari et al., 2024). Inovasi ini penting untuk menjembatani jarak antara generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem digital dengan realitas politik yang kerap masih berlangsung dalam pola analog.

Dengan memenuhi ketiga prasyarat tersebut, pendidikan literasi politik dapat menjadi ruang pembentukan *subjek demokratis*, yakni individu yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki keberanian untuk bersuara, bersikap, dan bertindak dalam mempertahankan ruang publik yang sehat (Suriaman et al., 2024). Literasi politik yang demikian tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi menjelma menjadi gerakan sosial yang memperkuat akar demokrasi dari bawah.

Lebih dari itu, literasi politik yang transformatif juga merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi ketahanan demokrasi Indonesia. Di tengah ketidakpastian global, fragmentasi identitas, dan krisis kepercayaan terhadap institusi negara, satu-satunya jalan ke depan adalah memperkuat basis warga yang berpikir kritis, bertindak etis, dan berjejaring secara kolektif (K. M. P. Setiawan & Tomsa, 2023). Literasi politik harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional, bukan sekadar dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi terintegrasi dalam kebijakan, kurikulum, dan praktik sosial warga sehari-hari (Pratama, 2021).

Pada hakikatnya, pendidikan literasi politik bukan hanya tentang bagaimana warga memahami demokrasi, tetapi bagaimana mereka menjadi demokrasi itu sendiri,

melalui tindakan, solidaritas, dan keberanian untuk mengubah tatanan yang timpang (Wijaya & Amalia, 2024). Di sinilah letak urgensi transisi dari *literasi politik sebagai pengetahuan* menuju *literasi politik sebagai praksis sosial*. Ini adalah jalan ke depan yang tidak mudah, tetapi satu-satunya jalan untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tetap bernapas, hidup, dan relevan dalam denyut zaman yang terus berubah (Prasetyo et al., 2025).

### IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya khazanah literatur dalam bidang pendidikan politik dan demokrasi kritis dengan mengusulkan pendekatan literasi politik yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif-prosedural, tetapi juga pada aspek afektif-reflektif dalam membentuk warga negara yang kritis di era *post-truth*. Temuan ini mengafirmasi bahwa kompetensi politik warga negara tidak dapat dibangun semata-mata melalui pemahaman institusi atau mekanisme formal demokrasi, melainkan juga melalui internalisasi nilai-nilai deliberatif, empati lintas identitas, dan resistensi terhadap manipulasi informasi digital.

Dalam ranah teoritis, penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan pedagogi kritis Freirean dan teori demokrasi deliberatif dalam merancang pendidikan literasi politik yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Hasil studi ini turut mengintegrasikan teori ruang publik (Habermas), teori *post-truth* (McIntyre), dan teori literasi media digital dalam suatu kerangka konseptual yang holistik, sehingga dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai intervensi kultural terhadap polarisasi politik dan erosi rasionalitas publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam mengembangkan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan digital yang berorientasi pada etika, kritisisme, dan tanggung jawab sosial.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan arah strategis bagi pendidik, perancang kurikulum, lembaga pemerintah, dan komunitas sipil dalam membangun model pendidikan literasi politik yang relevan dengan tantangan zaman. Dalam konteks masyarakat Indonesia pascapemilu 2024 yang terpolarisasi secara digital dan emosional, pendidikan literasi politik dapat menjadi alat intervensi sosial untuk merawat nalar publik, membangun dialog antar kelompok, serta membekali warga negara dengan kemampuan memilah, menilai, dan mengkritisi informasi secara aktif.

Implikasi ini sangat penting diterapkan dalam ekosistem pendidikan kewarganegaraan, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun dalam pendidikan nonformal dan komunitas digital. Lembaga pendidikan dan masyarakat sipil dapat mengadaptasi temuan ini untuk:

1. Mengembangkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan literasi digital-politik sebagai kompetensi utama dalam membangun demokrasi yang sehat.

2. Menyusun modul dan media pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengkritisi narasi dominan, memverifikasi informasi, serta memahami kerja algoritma dalam memengaruhi opini publik.
3. Menyelenggarakan diskusi lintas identitas di ruang digital dan fisik sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi deliberatif yang kontekstual dan kolaboratif.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini memberikan dasar normatif dan praktis bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penyelenggara pemilu, untuk mereformulasi arah pendidikan politik dan kewarganegaraan yang adaptif terhadap transformasi digital dan tantangan *post-truth*. Diperlukan kebijakan strategis yang:

1. Mewajibkan integrasi literasi politik berbasis media digital dan nilai deliberatif dalam kurikulum nasional pendidikan kewarganegaraan.
2. Mendorong kolaborasi antarsektor (sekolah, perguruan tinggi, media, LSM) dalam menciptakan ekosistem pendidikan demokrasi yang kritis dan partisipatif.
3. Menyediakan platform digital interaktif yang dapat diakses publik untuk pembelajaran politik yang faktual, reflektif, dan bebas dari polarisasi partisan.

Dalam aspek metodologis, penelitian ini menunjukkan relevansi pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dalam merumuskan kritik konseptual terhadap fenomena demokrasi digital dan merancang alternatif pendekatan pendidikan. Model ini terbukti mampu menggali keterhubungan antara disrupsi informasi, pembentukan opini publik, dan praktik pendidikan, sekaligus menawarkan konstruksi baru dalam bidang studi kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat digunakan secara luas dalam pengajaran metodologi penelitian politik dan pendidikan, sebagai contoh konkret bagaimana sintesis literatur dapat menghasilkan inovasi konseptual yang aplikatif.

Hasil penelitian ini juga membuka ruang luas bagi pengembangan riset lanjutan berbasis lapangan (empiris) yang dapat difokuskan untuk:

1. Mengevaluasi efektivitas program literasi politik berbasis komunitas dalam membentuk kapasitas warga menghadapi hoaks dan narasi polarisasi.
2. Meneliti dampak pendekatan pedagogis kritis terhadap kemampuan peserta didik mengenali bias informasi dan mengembangkan empati politik lintas identitas.
3. Mengembangkan model pelatihan guru dan fasilitator pendidikan kewarganegaraan digital yang menggabungkan pendekatan interdisipliner antara pendidikan, media, dan etika komunikasi.

Hasil penelitian ini berkontribusi penting tidak hanya sebagai referensi akademik dalam kajian demokrasi dan pendidikan, tetapi juga sebagai rujukan kebijakan dan inspirasi pedagogis untuk memperkuat demokrasi substansial di era informasi. Pendidikan literasi politik tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi utama dalam menjaga nalar publik, memperkuat kohesi sosial, dan

merawat etos demokrasi di tengah gelombang disinformasi dan politik afektif yang kian menguat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa dinamika demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024 berlangsung dalam kondisi paradoks komunikasi digital yang sarat polarisasi, politisasi identitas, dan disinformasi yang terstruktur. Temuan besar dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi politik memiliki peran strategis sebagai sarana membentuk kesadaran demokratis yang kritis dan inklusif, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuannya mengintervensi cara warga berpikir, berpartisipasi, dan memverifikasi informasi di ruang publik digital. Temuan perincinya mengindikasikan bahwa (1) literasi politik yang hanya bersifat kognitif tidak memadai untuk menghadapi fenomena *post-truth*; (2) pendekatan pedagogis kritis yang menggabungkan aspek etika, solidaritas, dan keberanian sipil terbukti lebih relevan; dan (3) media sosial serta algoritma digital memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk wacana politik, sehingga strategi pendidikan politik harus adaptif terhadap logika platform dan dinamika informasi daring.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada pengembangan kerangka konseptual literasi politik kritis yang dapat digunakan sebagai referensi akademik, rujukan kebijakan, dan inspirasi pedagogis dalam memperkuat demokrasi substantif di era digital. Secara praktis, hasil kajian ini membuka peluang bagi desain pendidikan politik yang terintegrasi dengan literasi digital dan etika publik. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang hanya mengandalkan sumber literatur tanpa verifikasi lapangan, sehingga generalisasi temuan bersifat terbatas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggabungkan studi literatur dengan riset empiris melalui survei atau etnografi digital, guna memperkaya pemahaman tentang perilaku politik warga di ekosistem media sosial dan menguji efektivitas intervensi pedagogis yang diusulkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Hamudy, M. I., & Rifki, M. S. (2025). POWER RELATIONS IN THE CONTEXT OF LITERACY IMPROVEMENT IN EAST JAVA, INDONESIA. *Jurnal Wacana Politik*, 10(1).
- Adam, D. B. (2025). *Post-truth* Politics in an Election Year: Digital Disinformation and Political Polarization in Indonesia and the United States. *Journal of Political Innovation and Analysis*, 2(1), 32–41.
- Anjarsari, R., Rusnaini, R., & Nuryadi, M. H. (2024). Effectiveness of civic political literacy through collaboration between schools and NGOs in Makassar city. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 62–70.
- Baker, J. (2023). Reformasi reversal: structural drivers of democratic decline in Jokowi's middle-income Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(3), 341–364.
- Belinda, F., Somantri, G. R., Runturambi, A. J. S., & Puspitasari, M. (2024). Manipulation of

- information in the 2024 election in Indonesia: political dynamics in the *post-truth* era. *Migration Letters*, 21(3), 43–58.
- Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). *Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics*. Oxford University Press.
- Berry, D. M. (2025). The heteronomy of algorithms: Traditional knowledge and computational knowledge. *ArXiv Preprint ArXiv:2505.11030*.
- Bowyer, B., & Kahne, J. (2020). The digital dimensions of civic education: Assessing the effects of learning opportunities. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 69, 101162. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101162>
- Boyd, D. (2014). *Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications*.
- Figà Talamanca, G., & Arfini, S. (2022). Through the newsfeed glass: Rethinking filter bubbles and echo chambers. *Philosophy & Technology*, 35(1), 20.
- Floranti, A. D., Mubarak, Y., Saifullah, A. R., & Gunawan, W. (2023). Urban arts as critical commentary acts of pandemic in Indonesia: Multimodal critical discourse analysis. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2256087.
- Freire, P. (2020). Pedagogy of the oppressed. In *Toward a sociology of education* (pp. 374–386). Routledge.
- Gherman, O., Turcu, C. E., & Turcu, C. O. (2022). An approach to adaptive microlearning in higher education. *ArXiv Preprint ArXiv:2205.06337*.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.
- Goel, V., Sahnan, D., Dutta, S., Bandhakavi, A., & Chakraborty, T. (2023). Hatemongers ride on echo chambers to escalate hate speech diffusion. *PNAS Nexus*, 2(3), pgad041.
- Haryani, T. N., Amin, M. I., Husna, A. M., & Lestari, S. M. (2024). Penguatan Literasi Politik Bagi Generasi Z:(Kajian Sebelum Masa Pemilihan Umum 2024). *Jurnal Kapita Sosial Politik*, 1(1), 20–32.
- Ho, M., Berto, A. R., & Murwani, E. (2024). Perang Narasi di Instagram: Analisis Sentimen dan Pola Komunikasi Netizen Terkait Hasil Pilpres 2024. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 79–88.
- Immordino-Yang, M. H., Kundra, C., Knecht, D., & Matthews, J. (2024). Civic reasoning depends on transcendent thinking: Implications of adolescent brain development for SEL. *Social and Emotional Learning: Research, Practice, and Policy*, 4, 100067. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sel.2024.100067>
- Imsa, M. A., Pamungkas, B. F., Kamil, D., & Sadewo, R. (2025). Digital Literacy Among Students in Indonesia Presidential Election 2024. *Proceedings of the 5th Annual Civic Education Conference (5th ACEC 2024)*, 909, 5.
- Isabella, I., Alfitri, A., Saptawan, A., Nengyanti, N., & Baharuddin, T. (2024). Empowering digital citizenship in Indonesia: Navigating urgent digital literacy challenges for effective digital governance. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(2), 142–155.
- Ivancsyah, R. K. (2025). Evaluasi Tata Kelola KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan

- Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 4(2), 76–84.
- Jenkins, H., & Jie, Y. (2024). The path from participatory culture to participatory politics: A critical investigation—An interview with Henry Jenkins. *Communication and the Public*, 9(1), 11–30.
- Ju'subaidi, Mujahidin, A., Abdullah, I., & Choirul Rofiq, A. (2025). Students' critical awareness of the internet and social media use as resources for Islamic learning in Indonesian public senior high schools. *British Journal of Religious Education*, 47(2), 140–155.
- Kaluža, J. (2022). Habitual generation of filter bubbles: why is algorithmic personalisation problematic for the democratic public sphere? *Javnost-The Public*, 29(3), 267–283.
- Kekki, M.-K. M. (2024). From paradoxical freedom of opinion to media education as defensive democracy. *Ethics and Education*, 19(4), 485–505.
- Khamdan, M., & Abidin, N. (2025). Election Insecurity in Social Media Campaigns: An Analysis of the 2024 Indonesian Presidential Election. *Fenomena*, 24(1), 51–64.
- Khriswina, S. A., Wibowo, S. E., & Sartono, E. K. E. (2025). Civic Education in Digital Era: Implementing Pancasila Values for Generation Z College Students. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(1), 1574–1588.
- Kulau, F. (2024). Tiktok, Instagram and Presidential Election: A Study to Understand How Politainment in Indonesian Political Campaigns 2024. *Informasi*, 54(2), 164–176.
- Kurniawan, A. R. (2025). The Threat of Forming a *Post-truth* Scenario Through Political Propaganda by Social Media Users in the 2024 General Election. *Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ)*, 2(1), 56–64.
- Laventia, F., Faizal, A., & Slamet, S. (2025). Pendidikan Politik di Era Digital: Media Sosial sebagai Katalis atau Distorsi? *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 423–427.
- Lazzavietamsi, F. A. (2024). Membangun Warga Negara Transformatif Pada Masyarakat Pancasila Melalui Pendidikan Politik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1), 106–113.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., Cook, J., van der Linden, S., Roozenbeek, J., & Oreskes, N. (2023). Misinformation and the epistemic integrity of democracy. *Current Opinion in Psychology*, 54, 101711. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101711>
- Lilja, J., Eklund, N., & Tottie, E. (2024). Civic literacy and disinformation in democracies. *Social Sciences*, 13(8), 405.
- Lim, M. (2020). Algorithmic enclaves: Affective politics and algorithms in the neoliberal social media landscape. In *Affective politics of digital media* (pp. 186–203). Routledge.
- Lybeck, R., Koironen, I., & Koivula, A. (2024). From digital divide to digital capital: the role of education and digital skills in social media participation. *Universal Access in the Information Society*, 23(4), 1657–1669.

- MAFINDO. (2024). *Siaran Pers Mafindo: Hoaks Politik Meningkatkan Tajam Jelang Pemilu 2024, Ganggu Demokrasi Indonesia*. MAFINDO. <https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024-ganggu-demokrasi-indonesia>
- Mawarti, R. A., & Restuningsih, E. D. (2024). Strategy For Strengthening Political Literacy of Youth Through Political Education Based on Social Media. *SHS Web of Conferences*, 204, 3001.
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. MIT Press.
- Metag, J., & Gurr, G. (2023). Too much information? A longitudinal analysis of information overload and avoidance of referendum information prior to voting day. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 100(3), 646–667.
- Milli, S., Carroll, M., Wang, Y., Pandey, S., Zhao, S., & Dragan, A. D. (2025). Engagement, user satisfaction, and the amplification of divisive content on social media. *PNAS Nexus*, 4(3), pgaf062.
- Mustofa, M. U., Utama, R. S., & Andalus, M. K. (2024). E-Democracy in Indonesia: Use of Social Media and Challenges in Encouraging Youth Political Participation. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(1), 102–111.
- Nally, D. (2024). A democratic curriculum for the challenges of *post-truth*. *Curriculum Perspectives*, 44(2), 229–245.
- Nurfebriansyah, A. R., Rahmatunnisa, M., Immanuel, G. K., Suramahardini, K. M., & Yamani, M. L. T. (2025). Challenges of Indonesian Democracy Post-2024 Election. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 9(1), 138–152.
- Nurmansyah, N. (2024). *Post-truth* Politics: Tantangan Media Arus Utama di Indonesia dalam Menghadapi Gelombang Hoaks. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 47475–47480.
- Nyabola, N. (2018). *Digital democracy, analogue politics: How the Internet era is transforming politics in Kenya*. Bloomsbury Publishing.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. penguin UK.
- Prasetyo, W. H., Rahmawati, N., & Rahayu, R. D. (2025). Civic Literacy in Digital Age for Learning Democracy: A. *Proceedings of the 5th International Conference on Education for All (ICEDUALL 2024)*, 904, 268.
- Pratama, I. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Political Literacy dan Political Culture Warga Negara Muda. *Jurnal Sustainable*, 4(1), 12–22.
- Prihantoro, E., Widyaningsih, W., & Ramadhani, R. W. (2024). PENGARUH TERPAAN MEME POLITIK, KUALITAS INFORMASI DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP SIKAP PEMILIH PEMULA DI JABODETABEK. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 351–371.
- Purwadi, D., Saliman, S., & Umar, U. (2024). Metamorphosis of citizenship education: Ignizing national awareness of the younger generation. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2), 206–213.
- Putra, B. K., Farhaini, A., Aini, D., Nurjannah, S., Noviana, N., & Ismi, R. (2023). Voter

- Education to Increase Community Participation in the 2024 General Elections (Case Study of KPU Malang Regency). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 806–826.
- Putra, F. D., Cangara, H., & Ullah, H. (2022). Memes as a symbol of political communication. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 85–98.
- Rahman, I. N., Budimansyah, D., Suryadi, K., & Sundawa, D. (2023). Bibliometric review of service learning on civic education. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 11(1), 95–101.
- Randiawan, R., Suryadi, K., & Nur, M. (2023). The Concept of Democracy Education as an Effort for Developing The Political Culture of Participating Communities. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 8(1), 1–8.
- Regilme, S. S., & Parthenay, K. (2024). COVID-19 pandemic and competitive authoritarian regimes: human rights and democracy in the Philippines and Nicaragua. *Political Geography*, 115, 103212.
- Rezeki, T. I., Sagala, R. W., & Rabukit, R. (2024). *From Humour to Impact: Internet Memes in Political Discourse through (de) legitimization*.
- Salsabila, E. R., Febriyan, F., Kartika, C., & Batubara, T. (2024). Development of Critical Literacy Through Pancasila and Civic Education for Generation Z. *Cakrawala: Journal of Citizenship Teaching and Learning*, 2(2), 188–197.
- Sari, G. I., Winasis, S., Pratiwi, I., & Nuryanto, U. W. (2024). Strengthening digital literacy in Indonesia: Collaboration, innovation, and sustainability education. *Social Sciences & Humanities Open*, 10, 101100.
- Sari, P. R., & Harianto, S. (2025). *Corruption, Government, and the Educated Generation: A Social Impact Study from a Marxist Perspective*. 6(5), 3908–3914.
- Saud, M., Ida, R., Mashud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2023). Cultural dynamics of digital space: Democracy, civic engagement and youth participation in virtual spheres. *International Journal of Intercultural Relations*, 97, 101904.
- Setiawan, A., Sulastri, E., Ulum, M., Meidiana, D., & Asyrofuddin, M. I. (2025). Media-Mediated Political Literacy: Assessing Information Ecosystem Dynamics and Civic Empowerment in Indonesia's 2024 Electoral Context. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955/ p-ISSN 2809-0543*, 6(9), 3745–3762.
- Setiawan, K. M. P., & Tomsa, D. (2023). Defending a vulnerable yet resilient democracy: civil society activism in Jokowi's Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(3), 350–371.
- Setiyono, B., & Sardini, N. H. (2025). POLITICAL POLARIZATION IN THE 2024 LOCAL ELECTIONS: AN ANALYSIS OF ITS IMPACT AND IMPLICATIONS FOR LOCAL DEMOCRACY IN INDONESIA. *Jurnal Wacana Politik*, 10(1).
- Soeprapto, R. W. P. (2024). Meaningful Participation Through Online Channels in Legislation Making in Indonesia via Dpr. Go. Id Page. *Trunojoyo Law Review*, 6(2), 189–210.
- Sonni, A. F., Mau, M., Akbar, M., & Putri, V. C. C. (2025). AI and Digital Literacy: Impact on

- Information Resilience in Indonesian Society. *Journalism and Media*, 6(3), 100.
- Stitzlein, S. (2023). Teaching Honesty and Improving Democracy in the Post-Truth Era. *Educational Theory*, 73(1), 51–73.
- Sunstein, C. R. (2018). *Republic: Divided democracy in the age of social media*.
- Supriyadi, S., Haenilah, E. Y., Sinaga, R. M., Maulina, D., Yolida, B., & Irwandani, I. (2024). Inclusive learning in higher education: anthropology and critical consciousness lens. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 18(1), 209–216.
- Suriaman, S., Komalasari, K., Nurgiansah, T. H., Prayogi, R., & Bribin, M. L. (2024). Civic Education as an Integrated Knowledge System in the 21st Century: A Reform Approach. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(3), 423–443.
- Sutisna, A. (2017). Peningkatan literasi politik pemilih pemula melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 1(2).
- Tanzer, M., Campbell, C., Saunders, R., Booker, T., Luyten, P., & Fonagy, P. (2024). The role of epistemic trust and epistemic disruption in vaccine hesitancy, conspiracy thinking and the capacity to identify fake news. *PLOS Global Public Health*, 4(12), e0003941.
- Teegelbeckers, J. Y., Nieuwelink, H., & Oostdam, R. J. (2023). School-based teaching for democracy: A systematic review of teaching methods in quantitative intervention studies. *Educational Research Review*, 39, 100511.
- UNESCO. (2025). *Media and Information Literacy*. UNESCO Institute. <https://iite.unesco.org/mil/?utm>
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of # ReformasiDikorupsi and # TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, 543.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking* (Vol. 27). Council of Europe Strasbourg.
- Wijaya, M. M., & Amalia, H. S. (2024). Enhancing Political Participation through Civic Education: Integrating Digital and Social Media for Peaceful Elections among Generation Z in Indonesia. *Global Educational Research Review*, 1(2), 92–99.
- Xu, C., Li, J., Abdelzaher, T., Ji, H., Szymanski, B. K., & Dellaverson, J. (2020). The paradox of information access: On modeling social-media-induced polarization. *ArXiv Preprint ArXiv:2004.01106*.